



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan dan memberikan penghargaan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria sebagai unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2021 sampai dengan Oktober 2022.

KETIGA : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dievaluasi oleh tim penilai internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Rina Martiana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2022

DAFTAR UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2022

NO.	UNIT KERJA
1.	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3.	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
4.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
5.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
6.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
8.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
11.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
12.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
13.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan


15.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
16.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
17.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
18.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Eri Martiana

